

Peran Bank Sentral dalam Menjaga Stabilitas Moneter dan Sistem Keuangan di Era Digital

Nur Safria Halillah¹, Nur 'Aini²

^{1,2}Ekonomi Syariah, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Mataram, Indonesia

nurhalillah11@gmail.com¹, aininingrum77@gmail.com²

ABSTRACT

Keywords:

Central Bank, Monetary Stability, CBDC, Payment System, Financial Digitalization, QRIS.

Abstract: The rapid digital transformation in the financial sector has presented both new challenges and opportunities for central banks in fulfilling their core mandates of maintaining monetary and financial system stability. This article aims to analyze the strategic role of central banks, particularly Bank Indonesia, in responding to digital disruption through monetary policy, payment system oversight, and the development of new instruments such as Central Bank Digital Currency (CBDC). This study employs a qualitative method with a descriptive-analytical approach, utilizing secondary data from official Bank Indonesia reports, academic journals, and current financial regulations. The analysis reveals that the effectiveness of central banks in preserving economic stability highly depends on technological adaptation, strengthened digital regulations, and synergy with other financial authorities. The digitalization of the payment system, such as the implementation of BI-FAST and QRIS, serves as a concrete step reaffirming the central bank's position as a guardian of stability in the digital era. In conclusion, the role of central banks continues to evolve, and strengthening digital capacity is key to maintaining public trust and national financial system resilience.

Kata Kunci:

Bank Sentral, Stabilitas Moneter, CBDC, Sistem Pembayaran, Digitalisasi Keuangan, QRIS.

Abstrak: Transformasi digital yang pesat dalam sektor keuangan telah menghadirkan tantangan dan peluang baru bagi bank sentral dalam menjalankan fungsinya menjaga stabilitas moneter dan sistem keuangan. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis peran strategis bank sentral, khususnya Bank Indonesia, dalam menghadapi disrupsi digital melalui kebijakan moneter, pengawasan sistem pembayaran, dan pengembangan instrumen baru seperti Central Bank Digital Currency (CBDC). Metodologi yang digunakan adalah studi kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis berdasarkan data sekunder dari laporan resmi Bank Indonesia, jurnal ilmiah, dan regulasi terkini. Hasil analisis menunjukkan bahwa keberhasilan bank sentral dalam menjaga stabilitas ekonomi sangat bergantung pada adaptasi teknologi, penguatan regulasi digital, serta sinergi dengan otoritas keuangan lainnya. Digitalisasi sistem pembayaran seperti BI-FAST dan QRIS menjadi langkah konkret yang mempertegas posisi bank sentral sebagai pengendali stabilitas di era digital. Kesimpulannya, peran bank sentral terus berevolusi, dan penguatan kapasitas digital menjadi kunci dalam menjaga kepercayaan publik dan stabilitas sistem keuangan nasional.

Article History:

Received : 27-06-2025

Accepted : 01-08-2025



This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license

A. LATAR BELAKANG

Bank sentral merupakan lembaga yang memiliki peran strategis dalam menjaga kestabilan ekonomi suatu negara. Fungsi utamanya mencakup pengendalian inflasi, pengaturan dan pengawasan sistem pembayaran, stabilisasi nilai tukar, serta menjaga stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan. Dalam konteks Indonesia, peran tersebut diemban oleh Bank Indonesia, yang telah mengalami perluasan mandat seiring perkembangan zaman. Dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia yang telah direvisi beberapa kali, disebutkan bahwa Bank Indonesia memiliki tanggung jawab untuk menjaga kestabilan nilai rupiah melalui instrumen kebijakan moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran.

Namun, perkembangan teknologi informasi yang begitu pesat dalam satu dekade terakhir telah membawa tantangan baru bagi lembaga keuangan, termasuk bank sentral. Transformasi digital yang terjadi di sektor keuangan ditandai dengan kemunculan fintech, aset kripto, sistem pembayaran berbasis aplikasi, hingga potensi penerbitan Central Bank Digital Currency (CBDC) telah mengubah struktur dan dinamika sistem keuangan secara fundamental. Digitalisasi menghadirkan kemudahan transaksi, inklusi keuangan yang lebih luas, dan efisiensi biaya, namun di sisi lain juga meningkatkan risiko keamanan data, ketidakpastian regulasi, serta kemungkinan tergesernya peran bank dan institusi keuangan formal jika tidak diimbangi dengan respons kebijakan yang tepat.

Dalam hal ini, peran bank sentral mengalami pergeseran paradigma. Tidak hanya menjalankan fungsi tradisional melalui pengaturan suku bunga dan pengendalian jumlah uang beredar, bank sentral kini dituntut untuk menjadi pemimpin dalam transformasi digital keuangan nasional. Inisiatif seperti BI-FAST (layanan sistem pembayaran real-time domestik) dan QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard) adalah bentuk respons proaktif Bank Indonesia dalam menjawab kebutuhan transaksi digital yang aman, cepat, dan inklusif.

Meskipun demikian, tantangan yang dihadapi tidak sederhana. Penerbitan uang digital oleh entitas non-pemerintah seperti stablecoin dan aset kripto berpotensi mengganggu transmisi kebijakan moneter dan stabilitas nilai tukar. Selain itu, munculnya shadow banking dan peer-to-peer lending tanpa pengawasan langsung menambah kompleksitas sistem keuangan. Di sinilah letak pentingnya adaptasi dan inovasi kebijakan dari bank sentral agar tetap relevan dan mampu menjalankan fungsinya di era yang semakin terdigitalisasi.

Oleh karena itu, penting untuk mengkaji secara komprehensif bagaimana peran strategis bank sentral, khususnya Bank Indonesia, dalam menjaga stabilitas moneter dan sistem keuangan di tengah era digitalisasi keuangan yang cepat. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baik secara teoritis maupun praktis dalam pengembangan kebijakan moneter, regulasi sistem pembayaran, serta perlindungan stabilitas sistem keuangan nasional dalam konteks transformasi digital yang sedang berlangsung.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai peran strategis bank sentral khususnya Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas moneter dan sistem keuangan di era digital. Dalam konteks ini, penelitian tidak hanya berfokus pada fungsi konvensional bank sentral seperti pengendalian inflasi dan stabilitas nilai tukar, tetapi juga mencermati dinamika baru yang muncul akibat transformasi digital dalam sektor keuangan. Hal ini mencakup peran Bank Indonesia dalam mengembangkan kebijakan yang adaptif terhadap digitalisasi, seperti penguatan sistem pembayaran digital, pengawasan terhadap aset kripto, serta dukungan terhadap inklusi keuangan melalui inovasi teknologi.

Pendekatan kualitatif digunakan karena fokus penelitian terletak pada pemahaman mendalam terhadap fenomena, kebijakan, dan strategi kebanksentralan, bukan pada pengukuran angka secara kuantitatif. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat menggali berbagai perspektif, dinamika kebijakan, dan implikasi strategis yang mungkin tidak tertangkap melalui metode statistik. Data dikumpulkan melalui studi literatur, dokumen kebijakan resmi, laporan tahunan, dan publikasi Bank Indonesia serta lembaga terkait lainnya, yang kemudian dianalisis secara kritis untuk mengungkap peran, tantangan, dan arah kebijakan moneter di tengah disrupsi digital yang terus berkembang. Dengan demikian, hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memperkaya wacana akademik sekaligus menjadi masukan bagi pengambilan kebijakan ke depan.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Transformasi Digital dan Tantangan Bagi Bank Sentral

Perkembangan teknologi digital dalam sektor keuangan telah mengubah cara masyarakat bertransaksi, menyimpan dana, dan mengakses layanan keuangan. Fenomena seperti financial technology (fintech), aset kripto, blockchain, dan sistem pembayaran digital telah menciptakan ekosistem keuangan baru yang cepat, efisien, namun penuh risiko.

Bagi bank sentral, perubahan ini merupakan tantangan besar karena secara tradisional, pengendalian moneter dilakukan melalui instrumen konvensional seperti suku bunga dan operasi pasar terbuka. Ketika masyarakat mulai beralih ke aset digital dan sistem pembayaran non-bank, efektivitas transmisi kebijakan moneter berpotensi menurun. Selain itu, stabilitas sistem keuangan juga semakin rentan terhadap ancaman siber, ketidakpastian regulasi, dan disintermediasi lembaga keuangan.

Bank Indonesia, sebagai bank sentral, tidak hanya berhadapan dengan tugas menjaga inflasi dan nilai tukar, tetapi juga harus mampu menjamin bahwa sistem pembayaran tetap aman, efisien, dan inklusif. Ini membutuhkan pendekatan baru dalam perumusan kebijakan dan pengembangan infrastruktur keuangan nasional.

2. Inovasi Sistem Pembayaran: BI-FAST dan QRIS

a. BI-FAST (Bank Indonesia Fast Payment)

BI-FAST merupakan infrastruktur sistem pembayaran retail nasional yang memungkinkan transaksi real-time 24/7 dengan biaya murah (maksimal Rp2.500/transaksi). Layanan ini mendukung inklusi keuangan serta efisiensi ekonomi secara nasional. Sejak diluncurkan, BI-FAST telah mempercepat pengalihan masyarakat dari penggunaan uang tunai ke transaksi digital.

b. QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard)

QRIS adalah sistem standarisasi pembayaran digital berbasis kode QR yang dapat digunakan di seluruh Indonesia. QRIS memungkinkan UMKM hingga pelaku usaha informal menerima pembayaran digital dengan mudah dan murah. Dengan implementasi QRIS, terjadi peningkatan signifikan dalam volume transaksi digital, yang berdampak positif terhadap pencapaian target less cash society.

Melalui dua inovasi tersebut, Bank Indonesia berhasil menjaga kelancaran sistem pembayaran nasional dan memperkuat fungsi intermediasi keuangan, yang secara tidak langsung mendukung stabilitas moneter dan sistem keuangan.

3. Central Bank Digital Currency (CBDC): Inisiatif Rupiah Digital

Salah satu agenda strategis Bank Indonesia adalah penerbitan Central Bank Digital Currency (CBDC) dalam bentuk Rupiah Digital. CBDC dirancang sebagai bentuk digital dari uang fiat yang diterbitkan dan dijamin oleh negara. Inisiatif ini bertujuan untuk: (a) Menjaga kedaulatan moneter di tengah maraknya aset kripto; (b) Memperkuat transmisi kebijakan moneter; dan (c) Meningkatkan efisiensi dan keamanan sistem pembayaran.

Bank Indonesia telah merilis White Paper Rupiah Digital sebagai langkah awal menuju implementasi CBDC. CBDC dapat menjadi alat baru yang efektif dalam mengatur sirkulasi uang, mengawasi peredaran dana, serta mengurangi risiko shadow banking dan sistem keuangan informal. Namun demikian, CBDC juga mengandung risiko, seperti potensi disintermediasi bank, gangguan stabilitas likuiditas, dan tantangan keamanan digital. Oleh karena itu, kebijakan penerbitannya perlu dilakukan secara bertahap dan hati-hati dengan koordinasi lintas lembaga.

4. Peran Pengawasan dan Regulasi Terintegrasi

Selain inovasi, peran pengawasan bank sentral juga semakin kompleks di era digital. Bank Indonesia harus menjalin sinergi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Kementerian Keuangan, dan lembaga lain untuk mengatur ekosistem keuangan digital. Regulasi terhadap fintech, aset kripto, dan perusahaan teknologi keuangan lainnya harus memperhatikan aspek: (a) Perlindungan konsumen; (b) Stabilitas sistem keuangan; (c) Transparansi transaksi; dan (d) Pencegahan pencucian uang dan pendanaan terorisme (APU-PPT).

Bank Indonesia juga memperkuat kerangka hukum dan operasional melalui peta jalan digitalisasi sistem pembayaran serta penyusunan regulasi khusus untuk mendukung implementasi CBDC dan sistem pembayaran lintas batas.

5. Sinergi dan Literasi Ekonomi Digital

Stabilitas moneter dan sistem keuangan tidak akan tercapai tanpa partisipasi publik. Oleh karena itu, Bank Indonesia secara aktif mengedukasi masyarakat tentang manfaat dan risiko transaksi digital, penggunaan QRIS, serta pemahaman terhadap keamanan siber. Kampanye “Bangga Buatan Indonesia” dan “Bangga Pakai QRIS” menjadi bagian penting dari strategi edukasi nasional. Bank Indonesia juga menjalin kerja sama dengan pelaku industri, akademisi, dan regulator internasional untuk merumuskan strategi digitalisasi keuangan yang inklusif, aman, dan berkelanjutan.

D. SIMPULAN DAN SARAN

Di era digital, peran bank sentral mengalami perluasan yang signifikan. Bank Indonesia tidak hanya menjaga stabilitas moneter dan nilai tukar, tetapi juga dituntut menghadirkan sistem pembayaran yang efisien dan aman serta merespons kemunculan inovasi keuangan digital. Implementasi BI-FAST dan QRIS telah menjadi langkah nyata dalam mendorong inklusi dan efisiensi sistem pembayaran nasional. Selain itu, pengembangan Rupiah Digital (CBDC) merupakan strategi penting untuk menjaga kedaulatan moneter di tengah pesatnya pertumbuhan aset digital.

Namun, digitalisasi juga membawa tantangan baru, seperti risiko siber, disintermediasi bank, dan ketimpangan literasi digital. Oleh karena itu, beberapa saran strategis yang perlu diperhatikan antara lain: Memperkuat infrastruktur teknologi dan keamanan sistem pembayaran, Mempercepat kajian dan uji coba Rupiah Digital secara bertahap, Meningkatkan kerja sama regulasi dengan lembaga nasional dan internasional, Mendorong literasi keuangan digital di seluruh lapisan Masyarakat, Melakukan pemantauan ketat terhadap perkembangan fintech dan aset digital. Dengan adaptasi yang tepat dan responsif, bank sentral akan tetap menjadi pilar utama dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah transformasi digital yang terus berkembang.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing, keluarga, serta semua pihak yang telah memberikan dukungan, arahan, dan motivasi sehingga jurnal ini dapat diselesaikan dengan baik. Semoga tulisan ini bermanfaat dan menjadi kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan.

REFERENSI

- Bank Indonesia. (2023). Laporan Perekonomian Indonesia 2022. Jakarta: Bank Indonesia.
<https://www.bi.go.id>
- Bank Indonesia. (2022). White Paper: Pengembangan Rupiah Digital. Jakarta: Bank Indonesia.
- Bank Indonesia. (2021). Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia 2025. Jakarta: Bank Indonesia.
- Kurniawan, B. (2021). Digitalisasi Sistem Pembayaran dan Tantangan Bagi Bank Sentral di Era Fintech. *Jurnal Keuangan dan Perbankan*, 25(3), 412–423.
<https://doi.org/10.26905/jkdp.v25i3.5801>

- Zahra, N., & Widiyanti, R. (2022). Central Bank Digital Currency: Tinjauan Ekonomi dan Implikasinya terhadap Stabilitas Moneter. *Jurnal Ekonomi Moneter Indonesia*, 9(2), 155–168.
- Firmansyah, I., & Yustika, A. E. (2020). Peran Bank Sentral dalam Menjaga Stabilitas Sistem Keuangan: Suatu Pendekatan Kelembagaan. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, 11(1), 25–38.
<https://doi.org/10.22212/jekp.v11i1.2205>
- International Monetary Fund (IMF). (2021). The Rise of Digital Money. IMF Policy Paper.
<https://www.imf.org/en/Publications/Policy-Papers>
- Otoritas Jasa Keuangan (OJK). (2022). Outlook Industri Jasa Keuangan 2023. Jakarta: OJK.
<https://www.ojk.go.id>
- Auer, R., & Böhme, R. (2020). The technology of retail central bank digital currency. Bank for International Settlements (BIS) Working Paper No. 948.
- World Bank. (2022). Digital Financial Services. Washington, DC: World Bank Publications.
<https://www.worldbank.org>
- Prasetyo, W. H. (2021). Kebijakan Moneter di Era Digital: Tantangan dan Strategi Bank Sentral. *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Kebijakan Publik*, 8(1), 49–60.
- Arifin, Z. (2020). Financial Technology dan Masa Depan Sistem Keuangan: Perspektif Bank Sentral. *Jurnal Transformasi Digital Ekonomi*, 5(2), 88–97.